



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO BUDI PRASETYO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **206999**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.247.095.000**

1. Tanah Seluas 2165 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 552.075.000
2. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 517.500.000
3. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 101.400.000
4. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 133.120.000
5. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 390.000.000
6. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 52.000.000
7. Tanah Seluas 401 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 401.000.000
8. Tanah Seluas 92 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **205.100.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.100.000
2. MOBIL, TOYOTA CORONA 2000/SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000



3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS / SPREZO Tahun 2022, HASIL SENDIRI

Rp. 162.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 294.273.242

F. HARTA LAINNYA Rp. 350.000.000

Sub Total Rp. 3.120.918.242

III. HUTANG Rp. 219.333.329

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.901.584.913

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.